

Studi Literatur: Transformasi Kurikulum Indonesia 1947 Sampai Kurikulum Merdeka Dilihat dari Perspektif Model Kurikulum

Zahra Fadhilah Putri, Nurkholifatul Maula
Sekolah Kak Seto, Monash University Indonesia
zahrafadhilahp@gmail.com
nmau0004@student.monash.edu

Diterima:
13 Juni 2024,
Direvisi:
01 Juli 2024,
Disetujui:
26 Agustus 2024

ABSTRAK: Indonesia telah mengalami perubahan kurikulum sejak tahun 1947 hingga saat ini, yaitu Kurikulum Merdeka. Pada transformasinya, kurikulum disesuaikan dengan kondisi sosial dan pembangunan di Indonesia. Hingga saat ini, transformasi kurikulum terus berjalan sebagaimana sifat kurikulum yang dinamis yang terdiri atas perubahan kurikulum sebagian ataupun menyeluruh seperti perubahan tujuan, isi, hingga media belajar yang dipengaruhi oleh model kurikulum yang dipakai tiap kurikulum dari tahun 1947 sampai Kurikulum Merdeka tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi transformasi kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan Kurikulum Merdeka dari perspektif model kurikulum yang digunakan. Penelitian ini melakukan studi secara detail mengenai transformasi kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan Kurikulum Merdeka dilihat dari perbedaan model kurikulum yang dipakai. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *systematic literature review*. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa kurikulum tahun 1947 dan 1952 menggunakan model rekonstruksi sosial, kurikulum 1964 menggunakan model rekonstruksi sosial dan humanistik, kurikulum 1968 dan 1984 menggunakan model humanistik dan subjek-akademik, kurikulum 1994 menggunakan model rekonstruksi sosial dan subjek-akademik, Kurikulum KTSP (2004) menggunakan model humanistik, Kurikulum 2013 menggunakan model humanistik, rekonstruksi sosial, dan subjek-akademik, dan Kurikulum Merdeka menggunakan model humanistik, subjek-akademik dan teknologis.

Kata Kunci: Model kurikulum, Studi literatur, Transformasi kurikulum.

ABSTRACT: Indonesia has undergone curriculum changes from 1947 to the present day with the Merdeka Curriculum. Throughout its transformation, the curriculum has been adjusted to the social conditions and development in Indonesia. Until now, the transformation of the curriculum continues, as the nature of the curriculum is dynamic, involving partial and comprehensive changes such as the modification of objectives, content, and learning media influenced by the curriculum models used from 1947 to the Merdeka Curriculum in 2020.

Therefore, this study aims to describe and identify the curriculum transformation from 1947 to the Merdeka Curriculum from the perspective of the curriculum models used. This research conducts a detailed study on the curriculum transformation from 1947 to the Merdeka Curriculum by examining the different curriculum models applied. The research method uses a qualitative approach with a systematic literature review. The results of this study indicate that the 1947 and 1952 curricula used the social reconstruction model, the 1964 curriculum used both the social reconstruction and humanistic models, the 1968 and 1984 curricula used the humanistic and academic models, the 1994 curriculum used the social reconstruction and academic models, the KTSP Curriculum (2004) used the humanistic model, the 2013 Curriculum used the humanistic, social reconstruction, and academic models, and the Merdeka Curriculum uses the humanistic, academic, and technological models.

Keywords: *Curriculum model, Literature studies, Curriculum transformation*

PENDAHULUAN

Kurikulum penting sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.” Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti trackatau jalur pacu. Saat ini definisi kurikulum makin berkembang sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan.

Hadirnya kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Negara-negara penjajah yang mendiami wilayah Indonesia ikut juga memengaruhi sistem pendidikan di Indonesia (Muhammedi, 2016). Ditetapkannya

kegiatan belajar mengajar pada lembaga sekolah sejak zaman penjajahan Belanda menandakan bahwa kurikulum sudah diterapkan dari zaman penjajahan Belanda hingga saat ini dengan berbagai bentuk perubahan, baik dari segi isi, tujuan, strategi pelaksanaan dan metode mengajar, hingga model kurikulum yang digunakan.

Kurikulum di Indonesia senantiasa terdapat perubahan dan penyempurnaan serta bersifat dinamis. Hal ini karena hadirnya tantangan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar lingkungan sistem pendidikan yang menyebabkan kurikulum harus senantiasa menyesuaikan diri agar mampu memenuhi permintaan dari semua dimensi kehidupan (Widia, 2015). Pendidikan pada dasarnya harus relevan dengan kebutuhan masyarakat umum, maka hal ini menjadi tanggung jawab dari pengembangan model kurikulum yang harus mampu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mempersiapkan diri sehingga siap diterjunkan ke masyarakat.

Perubahan dan perkembangan kurikulum di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti perkembangan ilmu pengetahuan yang meningkat, kemajuan teknologi dan informasi, dan pola hidup manusia sehari-hari, serta persaingan dan perubahan di negara-negara maju yang

menjadikan negara berkembang harus ikut melakukan perubahan (Insani, 2019). Perkembangan kurikulum Indonesia dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 mengalami beberapa kali perubahan, yaitu: Kurikulum Rencana Pelajaran 1947, Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, Kurikulum 2006, Kurikulum 2013 pengembangan menjadi 2013 revisi, dan yang terakhir sampai dengan saat ini, yakni Kurikulum Merdeka Belajar tahun 2020.

Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia memiliki ciri khas dan ruang lingkup masing-masing. Hal ini dipengaruhi oleh penggunaan model kurikulum yang berbeda-beda setiap tahun. Penggunaan model kurikulum yang berbeda di Indonesia sejak tahun 1947 sampai Kurikulum Merdeka 2020 dipengaruhi oleh berbagai aspek internal ataupun eksternal pendidikan. Perubahan dan perkembangan kurikulum nasional di Indonesia diimplementasikan melalui penyesuaian dengan setiap satuan pendidikan dan menerapkan metode yang menyesuaikan dengan tujuan pendidikan.

Perbedaan pengembangan model kurikulum yang digunakan akan menentukan *output* pendidikan dan membentuk mutu pendidikan. Pengembangan model kurikulum merupakan salah satu implementasi dari inovasi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun. Pengembangan model pembelajaran dalam bidang teknologi pembelajaran telah dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan dalam teori belajar, pengelolaan informasi, komunikasi dan bidang lainnya (Achruh, 2019). Empat aliran pendidikan, yaitu pendidikan klasik, pribadi, teknologi, dan interaksionis memiliki model kurikulum dan praktik pendidikan yang berbeda hadir dalam transformasi kurikulum di Indonesia, antara lain: model kurikulum dari teori pendidikan klasik disebut kurikulum subjek-akademis, pendidikan pribadi disebut kurikulum

humanistik, teknologi pendidikan disebut kurikulum teknologis, dan dari pendidikan interaksionis disebut kurikulum rekonstruksi sosial (Rachma, 2024).

Bagaimana setiap transformasi pengembangan model kurikulum dapat dipahami secara menyeluruh oleh guru agar tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi belajar dapat diimplementasikan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Hal ini agar setiap perkembangan dan perubahan kurikulum dapat diimplementasikan secara keseluruhan dan dapat meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum, termasuk mengembangkan potensi peserta didik. Kunci keberhasilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas sangat ditentukan oleh pemahaman terhadap kurikulum. Faktanya, masih banyak sekali guru-guru di Indonesia yang dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh kurikulum (Yohanes Panggut, 2022). Ketidakpahaman guru pada penyesuaian model kurikulum menjadikan kurang maksimalnya proses pengembangan kompetensi peserta didik atau siswa.

Pada *literature review* ini, penelitian difokuskan pada analisis konsep transformasi kurikulum tahun 1947 sampai Kurikulum Merdeka tahun 2020 dilihat dari pengembangan model kurikulum yang digunakan. Rumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut: bagaimanakah transformasi kurikulum yang terjadi di Indonesia dari masa kemerdekaan, pascakemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga pascapandemi Covid-19 dilihat dari pengembangan model kurikulum yang digunakan yang dibatasi oleh faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan model kurikulum, yakni (a) tujuan, (b) bahan pelajaran, (c) proses belajar mengajar, dan (d) evaluasi yang tergambarkan dalam proses pengembangan model kurikulum tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* untuk menganalisis transformasi Kurikulum Indonesia 1947 sampai Kurikulum Merdeka dilihat dari model kurikulum. Berdasarkan penelitian dari Kalantari *et al.* (2020) dengan mengutip metode SLR yang dilakukannya, berikut beberapa langkah dalam pendekatan SLR:

1. memformulasikan pertanyaan penelitian;
2. mengumpulkan referensi dengan mengidentifikasi referensi yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian;
3. analisis deskriptif: mengevaluasi referensi yang sudah dikumpulkan; dan
4. mengidentifikasi kategori dan melakukan koding berdasarkan teori yang digunakan.

Pemilihan Artikel

Pencarian artikel dilakukan di basis data *online* IEEE, Springer, Science Direct, dan Google Scholar dengan fokus pada string pencarian yang didefinisikan untuk pertanyaan penelitian. Beragam pertanyaan penelitian dan minat yang meningkat dari para peneliti untuk mempelajari berbagai aspek. Karena jumlah makalah yang cukup besar, kami menggunakan prosedur berikut untuk memilih artikel yang paling terkait untuk setiap pertanyaan penelitian.

- Mengingat bahwa basis data mengusulkan arti kata kunci pencarian, sekitar 50 artikel dalam setiap pencarian dipertimbangkan untuk pemeriksaan lebih lanjut di tahap berikutnya.
- Kriteria penerimaan/penolakan diterapkan pada artikel yang telah disaring pada tahap pertama.
- Dengan mempelajari judul, abstrak, dan pendahuluan artikel, beberapa di antaranya dipilih untuk studi lebih lanjut.
- Dengan mempelajari teks artikel yang dipilih pada tahap sebelumnya, artikel final dipilih.

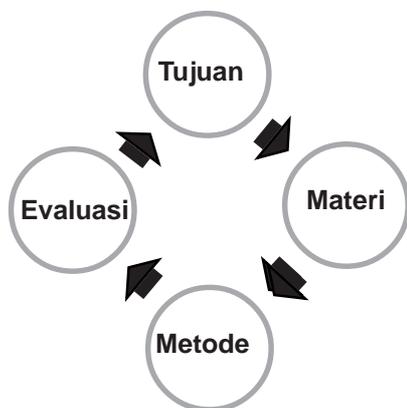
HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kurikulum Dilihat dari Model Kurikulum

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan model kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga Kurikulum Merdeka 2020 telah mengalami beberapa kali transformasi. Kurikulum mencakup berbagai mata pelajaran dan rencana pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Perkembangan kurikulum di Indonesia terbagi dalam dua periode utama, yaitu sebelum dan sesudah kemerdekaan. Penelitian ini membahas transformasi kurikulum Indonesia dari Kurikulum Rencana Pelajaran Tahun 1947 hingga Kurikulum Merdeka Belajar, dengan fokus pada model kurikulum yang digunakan. Model kurikulum yang digunakan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia sesuai dengan aliran filsafat pendidikan. Terdapat empat aliran utama, yaitu pendidikan klasik, pendidikan pribadi, pendidikan teknologi, dan pendidikan interaksional, masing-masing didasarkan pada aliran filsafat perenialisme, esensialisme, eksistensialisme, dan rekonstruksi sosial. Kurikulum subjek-akademis didasarkan pada pendidikan klasik (perenialisme dan esensialisme), kurikulum humanistik pada pendidikan pribadi, kurikulum rekonstruksi sosial pada pendidikan interaksional, dan kurikulum teknologi pada pendidikan teknologi. Keempat aliran pendidikan ini menghasilkan model kurikulum dan praktik pendidikan yang berbeda (Andhara, O., *et al.*, 2020).

Model kurikulum dari teori pendidikan klasik dikenal sebagai kurikulum subjek akademis, yang berfungsi untuk mengendalikan mata pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Pendidikan pribadi menghasilkan kurikulum humanistik, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan individu agar mereka dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dan keunikan masing-masing. Pendidikan interaksional menghasilkan kurikulum rekonstruksi sosial, yang tidak hanya menekankan pada minat individu, tetapi juga kebutuhan sosial. Teknologi pendidikan menghasilkan kurikulum teknologis, yang

memandang kurikulum sebagai proses teknologi untuk memenuhi kebijakan yang diinginkan (Bahri, 2017). Sebelum menetapkan model kurikulum yang digunakan, terdapat interaksi antara komponen-komponen kurikulum.



Gambar 1 Interelasi Komponen Kurikulum
(Masykur, R., 2019)

1. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947

Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 adalah kurikulum pendidikan pertama yang diterapkan di Indonesia pasca kemerdekaan. Kurikulum ini merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia karena menandai usaha untuk membentuk sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Pada saat itu, istilah yang lebih populer digunakan adalah *leer plan* (rencana pelajaran) daripada *curriculum* dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila. Karena situasi politik yang tidak stabil akibat gejolak perang revolusi, Rencana Pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, Rencana Pelajaran 1947 sering juga disebut sebagai Kurikulum 1950.

Model kurikulum yang digunakan dalam Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 yakni model kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mencerminkan identitas dan kebutuhan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Selain itu, tujuan utama kurikulum ini adalah

mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat, dengan materi pelajaran yang terkait dengan kegiatan sehari-hari serta penekanan pada kesenian dan pendidikan jasmani. Pada tahun ini juga pertama kali diperkenalkan mata pelajaran Civics karena pengaruh dari politik demokrasi terpimpin yang terjadi di Indonesia.

Kurikulum Rencana Pendidikan memiliki konten utama diantaranya yaitu: mata pelajaran terpisah (1946-1947); penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah (Ananda dan Sudaidah, 2021). Rencana Pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan karakter, kesadaran bernegara, dan kehidupan bermasyarakat daripada pendidikan akademik. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari dan memberi perhatian khusus pada seni dan pendidikan jasmani. Untuk tingkat sekolah rakyat, terdapat 16 mata pelajaran. Daftar pelajaran meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Menggambar, Menulis, Seni Suara, Pekerjaan Tangan, Pekerjaan Keputrian, Gerak Badan, Kebersihan dan Kesehatan, Pendidikan Budi Pekerti, dan Pendidikan Agama.

Garis besar pengajaran pada waktu itu menekankan metode mengajar guru dan cara belajar murid. Misalnya, pelajaran bahasa fokus pada cara bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Ilmu Alam mengajarkan proses kejadian sehari-hari dan penggunaan perkakas sederhana serta menyelidiki fenomena sehari-hari.

Evaluasi yang tergambarkan dalam proses pengembangan model kurikulum pada Rencana Pelajaran 1947 menggantikan sistem pendidikan kolonial Belanda dan mulai diterapkan di sekolah-sekolah pada tahun 1950 (Alhamuddin, 2014). Merujuk pada penelitian dari (Ananda dan Sudaidah, 2021), kurikulum ini menekankan pada aspek pendidikan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari serta pengembangan karakter dan kesadaran nasional. Pelaksanaan Kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif, tetapi hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme (Wibawanti, A. 2018).

Kurikulum Rencana Pelajaran tahun 1947 dapat dikatakan sebagai model rekonstruksi sosial, dapat dilihat dari tujuan, proses, dan evaluasi kurikulum. Tujuan mencerminkan identitas dan kebutuhan bangsa Indonesia yang baru merdeka serta mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat, dengan materi pelajaran yang terkait dengan kegiatan sehari-hari. Adapun proses kurikulum menekankan metode mengajar guru dan cara belajar murid. Evaluasi kurikulum ini tidak menekankan pada aspek kognitif, tetapi hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme.

Adapun *outcome* dari Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 dengan mengadopsi model rekonstruksi sosial ditujukan agar institusi sekolah sebagai institusi perubahan dan pengajaran masyarakat menjadi lebih baik. Sesuai dengan konteks tahun 1947, kurikulum ini berfokus pada penanaman nilai-nilai kebangsaan untuk menumbuhkan rasa kecintaan dan pemahaman masyarakat terhadap NKRI. Dengan adanya model implementasi model rekonstruksi sosial, masyarakat dapat memahami nilai-nilai kebangsaan yang diharapkan dapat memperkuat rasa kecintaan masyarakat terhadap NKRI.

2. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952

Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 terjadi penyempurnaan pada kurikulum di Indonesia. Kurikulum yang diperbarui ini, yang dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai 1952, menampilkan perincian yang lebih mendalam untuk setiap mata pelajaran. Model kurikulum rekonstruksi sosial masih dinilai dominan digunakan dalam pengaplikasian Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai. Hal ini ditandai dengan langkah menuju sistem pendidikan nasional yang lebih terstruktur. Tujuan kurikulum ini mengarah pada sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah memengaruhi hadirnya Kurikulum 1950 ini (Insani, 2019).

Salah satu proses belajar dalam Kurikulum 1952 yang paling terlihat adalah penekanan pada relevansi materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini menerapkan kurikulum yang berorientasi pada masyarakat sehingga setelah menyelesaikan pendidikan mereka langsung dapat bekerja. Bahan ajar yang tertuang dalam silabus kurikulum ini jelas menunjukkan bahwa setiap guru fokus mengajar satu mata pelajaran (Raharjo, 2020). Rencana Pelajaran Terurai 1952 memiliki fokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi, yaitu: (1) moral, (2) kecerdasan, (3) emosionalistik/artistik, (4) keterampilan, dan (5) jasmani (Ananda, 2021). Dalam konteks evaluasi yang dilakukan dalam proses pengembangan model kurikulum tahun 1952, kurikulum ini baru mengarah pada sistem pendidikan nasional yang dinilai belum mampu untuk menjangkau keseluruhan wilayah Indonesia.

Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai Tahun 1952 dapat dilihat dari tujuan kurikulum, proses, dan evaluasi. Tujuan kurikulum ini didasarkan pada sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Proses pada kurikulum ini mengutamakan penekanan pada relevansi materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Namun, kekurangan dari kurikulum ini yakni mengarah pada sistem pendidikan nasional yang dinilai belum mampu untuk menjangkau keseluruhan wilayah Indonesia. Model yang digunakan pada kurikulum ini dominan menggunakan rekonstruksi sosial. Setelah model Kurikulum 1947 diimplementasikan dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila, selanjutnya Kurikulum 1952 berfokus pada penyesuaian kurikulum sekolah dengan dunia pekerjaan. Berdasarkan tujuannya, kurikulum ini bertujuan untuk membangun stabilitas perekonomian masyarakat dengan mempersiapkan *outcome* lulusan sekolah untuk mendapatkan pekerjaan.

3. Kurikulum Rencana Pendidikan 1964

Setelah tahun 1952, menuju tahun 1964, pemerintah kembali melakukan penyempurnaan terhadap sistem kurikulum di Indonesia dengan diberikannya nama Rencana Pendidikan 1964. Sebelum tahun 1964, pemerintah mengembangkan sistem kurikulum di Indonesia, yang kali ini dinamakan Konsep Pembelajaran 1964 atau Kurikulum 1964. Fokus utama dari kurikulum ini adalah keinginan pemerintah agar masyarakat memperoleh pemahaman akademis terutama pada tingkat sekolah dasar (SD), yang melibatkan pengembangan energi kreatif, rasa, karsa, karya, dan moral. Tujuan Kurikulum 1964 adalah membentuk masyarakat sebagai manusia yang Pancasila, sosialis, memiliki sikap nasionalisme, dan cinta tanah air yang tinggi. Mata pelajaran dalam kurikulum ini juga berpusat pada klasifikasi lima kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, keterampilan, dan jasmaniah, serta berpusat pada pengembangan Pancawardhana. Oleh karena itu, model kurikulum yang digunakan dalam kurikulum ini adalah kombinasi model rekonstruksi sosial dengan humanistik.

Perkembangan kurikulum ini sudah dapat dikatakan sempurna karena sudah menyentuh ketiga aspek penting peserta didik, yakni perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik (Ananda, 2021). Dalam Kurikulum 1964 sudah ada upaya lebih dalam pengembangan potensi dan pendidikan yang sifatnya praktis bukan lagi hanya sekadar teori (Sukatin dan Pahmi, 2020). Konsep proses pembelajaran kurikulum yang aktif, kreatif, dan produktif menjadi hal yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964. Konsep tersebut disebut sebagai gotong royong terpimpin yang mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan masalah (*problem solving*) terhadap berbagai masalah yang ada dalam masyarakat. Guru berperan dalam merancang proses pembelajaran dan mengadopsi aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berorientasi pada tujuan kurikulum.

Namun, sebagai pendidik, guru juga harus memastikan bahwa pendekatan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, sejalan dengan kurikulum sekolah. Hal ini menegaskan pentingnya penguasaan guru terhadap kurikulum dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Pelaksanaan Kurikulum 1964 dinilai memiliki kekurangan, yaitu kurikulum ini dipergunakan pada tingkatan sekolah dasar dan belum melingkupi sekolah lanjutan hingga perguruan tinggi. Kurikulum ini juga dimaknai sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan khusus (Respatiadi *et al.*, 2022).

Kurikulum Rencana Pendidikan Tahun 1964 bertujuan untuk membentuk masyarakat sebagai manusia yang Pancasila, sosialis, dan memiliki sikap nasionalisme serta cinta tanah air yang tinggi. Tujuan tersebut didukung dengan proses kurikulum yang menekankan pada proses pembelajaran kurikulum yang aktif, kreatif, dan produktif. Gotong royong yang bersifat terpimpin mewajibkan setiap sekolah untuk membimbing anak agar mampu berpikir sendiri pemecahan masalah (*problem solving*). Namun, sayangnya, kurikulum ini hanya berfokus pada tingkatan sekolah dasar dan belum melingkupi sekolah lanjutan hingga perguruan tinggi. Kurikulum ini juga dimaknai sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan khusus.

Berdasarkan tujuan tersebut, kurikulum ini menggunakan model rekonstruksi sosial dan humanistik. Model rekonstruksi sosial menekankan pada penanaman nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Kedua hal tersebut diperkuat dengan model humanis. Model humanis ini diperkuat dengan penanaman pendidikan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Dengan adanya kombinasi kedua model tersebut, diharapkan *outcome* lulusan dapat menjadi pribadi yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kemampuan berpikir kritis sebagai dasar perkembangan kognitif.

4. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 adalah hasil pembaharuan dari Kurikulum 1964.

Perubahan utamanya adalah restrukturisasi kurikulum pendidikan dari fokus pada Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 mencerminkan implementasi yang lebih konkret dari perubahan arah dalam penerapan UUD 1945 dengan cara yang autentik dan bertanggung jawab (Aisy dan Hudaidah, 2021). Isi pendidikan bertujuan pada kegiatan menambah kecerdasan dan keterampilan, serta mempertahankan fisik yang sehat dan kuat (Alhamuddin, 2014).

Perubahan politik utama yang terjadi pada tahun 1965 terutama hasil dari peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September (G30S) atau PKI menyebabkan pergeseran kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Pejabat Presiden 11 Maret (Supersemar) Mayor Jenderal Soeharto, dan kemudian dilanjutkan dengan penunjukan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia oleh MPRS. Hal ini mengakibatkan banyak perubahan dalam kebijakan pendidikan dari era sebelumnya. Pada tahun 1966, MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXVII Tahun 1966, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan individu yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sesuai dengan semangat UUD 1945 dan isi dari UUD 1945 itu sendiri.

Dari perspektif tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan untuk menciptakan individu yang menjadi contoh nyata dari nilai-nilai Pancasila, yang memiliki kekuatan moral, intelektual, dan fisik yang kuat. Pendidikan dalam kerangka ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, serta mempromosikan kesehatan fisik yang optimal (Wahyuni, 2015). Pelaksanaan Kurikulum 1968 mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan berfokus pada moral dan kecerdasan yang terkandung dalam model humanistik dan subjek-akademis. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus (Alhamuddin, 2014). Namun, pada pelaksanaannya kurikulum ini dinilai hanya memuat mata pelajaran pokok

dan muatan materi pelajaran bersifat teoretis, tanpa mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan

5. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 dilatarbelakangi oleh pembangunan nasional. Kurikulum ini dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya mengimplementasikannya atau dapat dikatakan bersifat sentralistik. Selain itu, kurikulum pada tahun ini menitikberatkan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisiensi. Pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO (*management by objective*), terkenal pada saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran diperinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) atau saat ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Pendekatan PPSI merupakan suatu konsep pembelajaran yang berasumsi bahwa proses belajar mengajar diarahkan pada pencapaian tujuan (Wahyuni, 2015).

Kurikulum ini berpedoman pada: (1) tujuan instruksional, (2) desain program kurikulum, dan (3) garis-garis program pengajaran. Setiap satuan pelajaran diperinci menjadi: tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum ini memiliki sistem yang saling berkaitan dari satu instruksi yang terdiri atas urutan, desain tugas yang progresif bagi individu yang belajar. Penerapan model kurikulum bersifat subjek-akademis pada tahun ini.

Dalam proses belajar mengajar pada masa kurikulum ini berlangsung, siswa hanya berperan sebagai pribadi yang pasif, dengan hanya menghafal teori-teori yang ada tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Secara praktis, kurikulum ini menekankan pembentukan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja.

Sistem penilaian kurikulum ini dilakukan pada setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pembelajaran. Sistem penilaian inilah yang membedakan Kurikulum 1975 dengan kurikulum sebelumnya. Sistem penilaian

kurikulum ini dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar (Insani, 2019). Guru dituntut melakukan penilaian dengan menulis perincian capaian pada setiap akhir satuan pembelajaran. Oleh karena itu, kurikulum ini mendapatkan banyak evaluasi.

6. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975. Berbeda dari kurikulum sebelumnya, Kurikulum 1984 mengusung model pendekatan proses atau *process skill approach*. Kurikulum 1984 berorientasi kepada tujuan instruksional. Hal itu didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Selain itu, dalam proses belajar siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.

Kombinasi model kurikulum subjek-akademis dan humanistik juga mendominasi dalam pelaksanaan Kurikulum 1984. Kurikulum ini menggunakan pendekatan pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kurikulum ini menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum siswa diberikan latihan, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan peserta didik serta menggunakan pendekatan keterampilan proses pada peserta didik. Dalam implementasi kurikulum 1984 terdapat beberapa evaluasi, yakni beban belajar yang dinilai terlalu banyak diterima oleh siswa dan

tidak dapat tercapainya tujuan dari kurikulum 1984.

7. Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan Kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran kurikulum ini lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.

Kurikulum 1994 merupakan kurikulum yang berorientasikan pada mata pelajaran yang dikenal dengan sebutan *Separate Subject Curriculum*, yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang terpisah-pisah sehingga sering juga disebut sebagai *Separate Subject Curriculum*. Kurikulum 1994 juga bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, Kurikulum 1994 memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Dalam pengajaran, suatu mata pelajaran disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pematapan pemahaman siswa (Muhammedi, 2016).

Model kurikulum yang dominan pada Kurikulum 1994 ialah rekonstruksi sosial dan subjek-akademis. Kurikulum 1994 juga memiliki prinsip *link and match*, yaitu prinsip

tentang pentingnya keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Sekolah harus mampu menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan oleh industri. Sebaliknya, dunia industri juga harus bersinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Pada akhirnya kurikulum ini banyak dikritik karena pendidikan menjadi kepanjangan tangan dari proses industrialisasi dan tidak memanusiasikan manusia (dehumanisasi).

8. Kurikulum 2004

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diberlakukan di Indonesia sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan serta penyempurnaannya dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KBK memiliki empat komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar (KHB), penilaian berbasis kelas (PBK), kegiatan belajar mengajar (KBM), dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah (PKBS) (Muhammedi, 2016). Penerapan kurikulum berbasis kompetensi 2004 mengedepankan penguasaan materi hasil dan kompetensi paradigma pembelajaran versi UNESCO: *learning to know, learning to do, learning to live together*, dan *learning to be*. Tujuan KBK 2004 adalah mengembangkan kompetensi siswa. Selain itu, silabus ditentukan secara seragam, peran serta guru dan siswa dalam proses pembelajaran, dan silabus menjadi kewenangan guru. Jumlah jam pelajaran 40 jam per minggu, tetapi jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi. Metode pembelajaran keterampilan proses dengan melahirkan metode pembelajaran PAKEM dan CTL. Sistem penilaian lebih menitikberatkan pada aspek kognitif, penilaian memadukan keseimbangan kognitif, psikomotorik, dan afektif, dengan penekanan penilaian berbasis kelas.

Model kurikulum humanistik ditekankan pada Kurikulum 2004 atau yang disebut dengan Kurikulum Berbasis kompetensi (KBK) 2004. KBK 2004 merupakan suatu konsep pendekatan, strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta

didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab (Insani, 2019).

Depdiknas (2002) menjelaskan ciri-ciri Kurikulum Berbasis Kompetensi sebagai berikut.

- 1) Memperhatikan apa yang sah diperoleh siswa selama dilaksanakan KBM;
- 2) Hasil akhir dari sebuah pembelajaran adalah anak mempunyai agama dan keterampilan;
- 3) Metode pembelajarannya bermacam-macam menggunakan pendekatan dan metode yang beragam dan kontekstual;
- 4) Sumber belajar tidak hanya mengandalkan guru namun dari segala sesuatu yang mengandung edukasi; dan
- 5) Penilaian berdasarkan proses yang dilalui siswa dan hasilnya.

Dalam pelaksanaan KBK 2004 ini, sekolah diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut (Ananda, 2021). Namun, pelaksanaannya ditandai dengan ketidakjelasan guru dalam melaksanakan tugas sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang karakteristik Kurikulum 2004 dan juga terjebak dalam budaya birokratik (Yani A., 2020).

9. Kurikulum 2006

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 disusun untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah (Ananda, 2021). Kurikulum ini sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, yang artinya tidak ada intervensi dari Dinas

Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional (Manurung, 2019:93).

Prinsip pengembangan KTSP yang mengacu pada *output* kompetensi siswa untuk hidup dan bermasyarakat menjadikan dominasi model kurikulum rekonstruksi sosial. Adapun prinsip-prinsip pengembangan KTSP menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 sebagaimana dikutip dari Muhammedi (2016) adalah sebagai berikut:

- a. berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya;
- b. beragam dan terpadu;
- c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. relevan dengan kebutuhan;
- e. kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan tersebut dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja; dan
- f. menyeluruh dan berkesinambungan (Muhammedi, 2016).

Pada Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdapat sejumlah mata pelajaran serta ilmu pengetahuan yang harus ditempuh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu (naik kelas) atau untuk memperoleh ijazah. Kurikulum 2006 berfokus dengan rencana mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan (Ananda dan Hudaidah, 2021). Standar Isi (SI) yang merupakan pedoman dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang memuat:

- 1) kerangka dasar dan struktur kurikulum;
- 2) beban belajar;
- 3) KTSP yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan; dan
- 4) kalender pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) digunakan untuk penentuan kelulusan peserta didik. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran. Tujuan SKL disesuaikan dengan jenjangnya. Selain itu, proses belajar mengajar dalam pelaksanaan KTSP menekankan pada penguasaan

kompetensi yang berdampak pada metode pengajaran berbentuk latihan atau praktik yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pelaksanaan KTSP tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dalam kurikulum berikutnya. Kurikulum 2006 dinilai membuat celah besar dalam upaya pencapaian standar lulusan dan standar kelulusan. Selain itu, KTSP menyimpan potensi destruktif yang dapat berakibat pada disintegrasi bangsa.

10. Kurikulum 2013 (K-13)

E. Mulyasa (2013: 69-70) mengidentifikasi tiga aspek utama dalam pengembangan Kurikulum 2013. Pertama, penetapan kompetensi yang ingin dicapai, yang merupakan pernyataan tujuan (*goal statement*) untuk menggambarkan hasil belajar (*learning outcomes*) dalam hal pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap peserta didik. Kedua, strategi pencapaian kompetensi, yang berfungsi sebagai upaya untuk membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditetapkan. Ketiga, evaluasi sebagai bentuk kegiatan penilaian terhadap pencapaian kompetensi setiap peserta didik (Mulyasa, 2014).

Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi pondasi bagi tingkat berikutnya (Arifin, 2019). Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat dipahami sebagai konsep kurikulum yang berfokus pada pengembangan kemampuan peserta didik dalam melaksanakan tugas-tugas dengan standar kinerja tertentu. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat menguasai seperangkat kompetensi tertentu yang hasilnya dapat mereka rasakan. Pengertian ini menegaskan bahwa Kurikulum 2013 mengarahkan proses pembelajaran pada pengembangan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu melakukan sesuatu dengan kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan yang penuh tanggung jawab. Pola pembelajaran yang menekankan kompetensi dan karakter, melalui berbagai

strategi pencapaian, diarahkan untuk mencapai pembelajaran yang optimal (Sulaeman, 2015). Tiga model pembelajaran yang dilaksanakan pada Kurikulum 2013 meliputi Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*), Model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning*), Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*). Kurikulum 2013 tergolong dalam model kurikulum campuran, terdiri atas kurikulum humanistik, rekonstruksi sosial, teknologis, dan subjek-akademis.

Sesuai dengan pandangan Lingard (2021) mengenai kurikulum, Kurikulum 2013 dapat dilihat sebagai representasi dan respons terhadap globalisasi, serta refleksi kepentingan nasional. Pemerintah menyatakan bahwa Kurikulum 2006 lebih berfokus pada penilaian hasil belajar sehingga salah satu tujuan utama Kurikulum 2013 ini adalah untuk memprioritaskan penggunaan penilaian formatif (MOEC, 2017). Oleh karena itu, Kurikulum 2013 memperkenalkan berbagai teknik penilaian formatif baru, seperti jurnal dan observasi guru, penilaian diri, penilaian sejawat, penilaian berbasis proyek, dan portofolio (MOEC, 2017). Tuntutan perubahan model dan inovasi pembelajaran pada kurikulum 2013 di antaranya adalah pembelajaran tematik terintegrasi, pendekatan proses, menanamkan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam setiap matapelajaran, melatih atau membiasakan berpikir kritis, inovatif, implementasi pendekatan *scientific-approach* atau pendekatan ilmiah dalam pembelajaran di kelas (Anwas, 2014). Meskipun beberapa teknik formatif baru diperkenalkan dalam Kurikulum 2013, penilaian ini masih sangat bergantung pada tes dan ujian tradisional. Fokus pada persiapan siswa untuk tes atau ujian tidak sesuai dengan persyaratan untuk menggunakan penilaian formatif, dan tidak ada panduan bagi guru tentang cara menggunakan bukti penilaian untuk tujuan formatif guna meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Akibatnya, penilaian pengetahuan dan keterampilan umumnya tetap menjadi proses sumatif meskipun menggunakan beberapa teknik formatif.

Berdasarkan hasil riset (Puad dan Ashton, 2022), panduan penilaian yang dikembangkan di tingkat menengah tidak selaras dengan prinsip utama penilaian formatif yang dijelaskan dalam literatur. Walaupun kebijakan pemerintah menyatakan niat untuk mempromosikan penilaian formatif, panduan resmi tidak mencerminkan praktik dan prinsip tersebut. Sebagian besar detail tentang penilaian formatif berkaitan dengan penilaian sikap siswa. Contohnya, meskipun penilaian diri dan penilaian sejawat baru diperkenalkan dalam Kurikulum 2013, kedua metode ini digunakan untuk menilai sikap siswa, bukan pengetahuan atau keterampilan mereka, dan panduannya tetap bersifat preskriptif serta membebani guru. Selain itu, salah satu dampak dari kurikulum ini adalah bahwa pengajaran dan penilaian sikap menjadi sangat penting, dengan siswa tidak dapat naik ke tingkat berikutnya jika sikap mereka dianggap tidak memadai. Ini menunjukkan kontradiksi yang jelas antara tujuan penilaian formatif dan keputusan penting yang didasarkan pada hasil penilaian tersebut.

11. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka menekankan pada penggunaan teknologi yang memadai, sejalan dengan era digital yang canggih, yaitu era 5.0. Oleh karena itu, peserta didik dan pendidik harus mampu menggunakan teknologi seperti gadget, karena media pembelajaran akan lebih difokuskan pada teknologi, termasuk platform-platform yang ada di gadget, agar pembelajaran lebih bervariasi dan mampu membangkitkan semangat belajar peserta didik (Zakso, 2022).

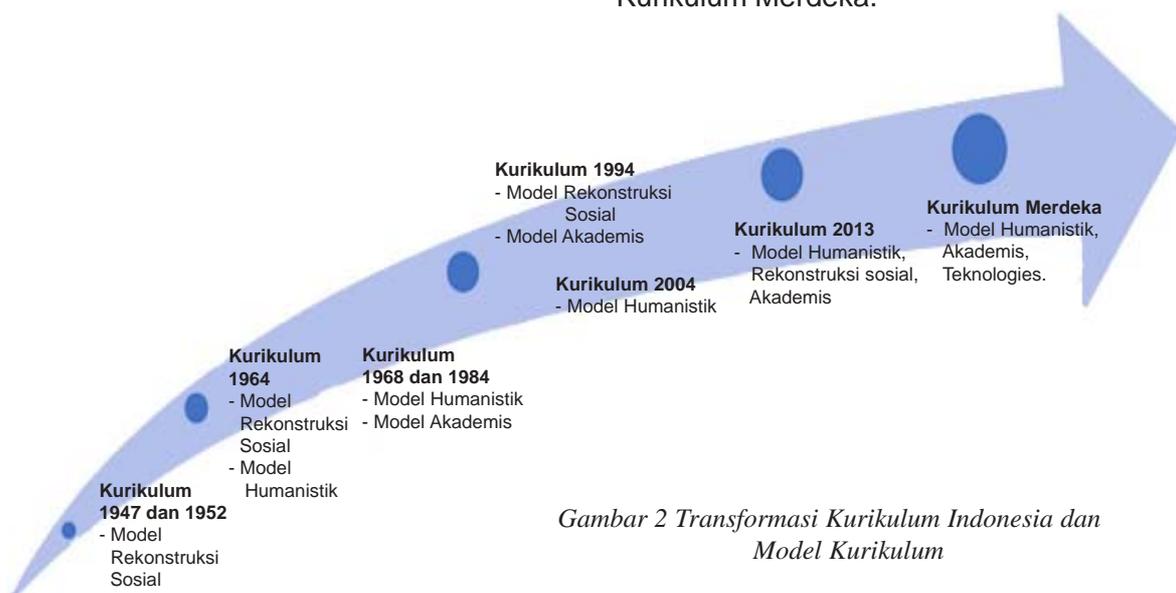
Kurikulum Merdeka menekankan pada kebebasan belajar bagi guru dan siswa dalam pembelajaran mandiri. “Kemendikbud mendefinisikan pembelajaran mandiri sebagai proses pembelajaran yang memberikan kebebasan dan kekuatan kepada setiap institusi agar bebas dari manajemen yang berantakan”. “Syarat utama untuk pembelajaran mandiri adalah memberikan kepercayaan diri kepada guru agar mereka merasa mandiri saat mengajar” (Koesoema, 2020).

Belajar menjadi lebih santai, guru dan siswa dapat berinteraksi dengan lebih bebas, dan pembelajaran dapat terjadi di luar ruangan kelas. Lebih dari itu, bukan hanya tentang mendengarkan penjelasan guru, melainkan juga tentang membangun keberanian, kemandirian, kecerdasan, keterlibatan sosial, perilaku sopan, kekompetenan, dan tidak hanya bergantung pada sistem peringkat yang seringkali mengganggu anak-anak dan orang tua (Sherly *et al.*, 2020) membahas konsep belajar bebas.

Kurikulum mandiri akan lebih bermakna dan interaktif. Pembelajaran berbasis proyek memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk secara aktif mengeksplorasi topik-topik tertentu. Sekolah yang dianjurkan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka adalah sekolah yang dianggap sudah siap, dari segi fasilitas, jumlah guru, dan sebagainya. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari tiga opsi untuk menerapkan kurikulum mandiri. Pertama, menggunakan prinsip-prinsip kurikulum mandiri tanpa mengubah kurikulum sekolah yang sudah ada. Opsi kedua adalah menggunakan kurikulum mandiri dengan tutorial yang sudah tersedia. Adapun opsi ketiga adalah mengembangkan materi ajar sendiri berdasarkan kurikulum mandiri.

Keuntungan dari penerapan kurikulum mandiri yang pertama adalah kesederhanaan dan kedalaman yang lebih. Kurikulum Merdeka fokus pada materi dan pengembangan yang penting untuk memenuhi kualifikasi siswa. Selain kepala sekolah, peran guru di sekolah juga sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum mandiri. Guru harus mampu menjadi pelatih, fasilitator, dan sumber inspirasi bagi siswa sehingga dapat memotivasi mereka untuk aktif, kreatif, dan inovatif (Savitri, 2020). Model kurikulum campuran terdiri atas kurikulum humanistik, rekonstruksi sosial, teknologis, dan subjek-akademis.

Evaluasi pada implementasi Kurikulum Merdeka adalah kurangnya sarana dan prasarana di sekolah sehingga guru hanya bisa menggunakan internet sebagai bahan ajar untuk sumber pembelajaran di kelas. Rancangan dan metode pembelajaran yang digunakan pada Kurikulum Merdeka tidak terlaksana dengan baik, serta belum tersusun secara sistematis (Almarisi, A. 2023). Selain itu, kelemahan Kurikulum Merdeka adalah kurangnya referensi bahan ajar, manajemen waktu, dan tidak terdistribusi secara merata akses pembelajaran Kurikulum Merdeka (Dewi, L. dan Astuti, 2022). Berikut gambaran transformasi kurikulum Indonesia dan model kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan Kurikulum Merdeka.



Gambar 2 Transformasi Kurikulum Indonesia dan Model Kurikulum

Tabel 2 Hasil Analisis Transformasi Kurikulum Indonesia Berdasarkan Model Kurikulum Dilihat dari Tujuan, Bahan Ajar, Proses Belajar, dan Evaluasi

No.	Tahun Kurikulum	Model Kurikulum
1.	Kurikulum 1947	Rekonstruksi sosial
2.	Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952	Rekonstruksi sosial
3.	Kurikulum Rencana Pendidikan 1964	Rekonstruksi sosial dan humanistik
4.	Kurikulum 1968	Humanistik dan subjek-akademis
5.	Kurikulum 1975	Subjek-akademis
6.	Kurikulum 1984	Humanistik dan subjek-akademis
7.	Kurikulum 1994	Rekonstruksi sosial dan subjek-akademis
8.	Kurikulum 2004	Humanistik
9.	Kurikulum 2006	Rekonstruksi sosial
10.	Kurikulum 2013 Pengembangan Menjadi 2013 Revisi Kurikulum	Campuran, terdiri atas kurikulum humanistik, rekonstruksi sosial, teknologis, dan subjek-akademis
11.	Kurikulum Merdeka Belajar Tahun 2020	Campuran, terdiri atas kurikulum humanistik, rekonstruksi sosial, teknologis, dan subjek-akademis

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Transformasi kurikulum di Indonesia yang terjadi dari era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga pascapandemi Covid-19 memiliki ciri khas yang berbeda yang disesuaikan dengan beragam faktor internal dan eksternal yang memengaruhi. Kurikulum tahun 1947 diprakarsai dari sikap nasionalisme yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Pokok-pokok kehidupan bernegara menjadi landasan awal kurikulum pendidikan di Indonesia pada awal masa kemerdekaan.

Transformasi kurikulum berorientasi pada pencapaian tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi belajar tiap kurikulum. Implementasi kurikulum pada tahun 1947 sampai dengan Kurikulum 1968 berlandaskan pada tujuan pendidikan untuk

meningkatkan nilai nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara. Penerapan tujuan dalam kurikulum era kemerdekaan sampai Orde Lama memiliki faktor pengaruh politik dan birokrasi yang masih tinggi. Dinilai dari aspek bahan pelajaran, pada Kurikulum 1947 sampai 1968 dibuat lebih sederhana dan memuat pokok mata pelajaran serta berfokus pada konsep nilai Pancasila. Selain itu, proses belajar yang dilakukan sentralistik dari guru kepada siswa dan kegiatan belajar mengajar ditujukan untuk pembentukan karakter dan meningkatkan nasionalisme.

Evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki kurikulum era kemerdekaan ini dilakukan pada era Orde Lama 1975 sampai 1999 yang berimplikasi pada penguasaan kognitif yang lebih dominan, tetapi kurang dalam penguasaan keterampilan (*skill*). Hal ini mengakibatkan lulusan pendidikan pada masa Orde Lama kurang memiliki kemampuan yang memadai terutama yang bersifat aplikatif sehingga diperlukan kurikulum yang berorientasi pada penguasaan kompetensi secara menyeluruh pada perkembangannya. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada Kurikulum 1975 sampai 1999 pun beragam, yakni berpedoman pada tujuan instruksional dan penyesuaian Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku pada tahun tersebut.

Proses belajar pun tidak lagi berfokus pada penjelasan guru, tetapi siswa juga berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran serta aspek kognitif siswa mulai menjadi fokus dalam implementasi kurikulum pada tahun tersebut. Model kurikulum yang digunakan pada Orde Baru relatif beragam. Terdapat penggunaan model tunggal, yakni subjek-akademis, tetapi juga terdapat pelaksanaan model kurikulum yang didominasi dengan kombinasi model kurikulum, yakni subjek-akademis dan humanistik, rekonstruksi sosial, dan subjek-akademis. Beriringan dengan transformasi kurikulum, kompetensi siswa yang diharapkan pun ikut berkembang dari Kurikulum 2006 sampai Kurikulum 2013. Mulai ada pembelajaran kolaboratif dengan beragam bidang dan industri kerja, penekanan sains dan riset, serta karakter dan

potensi masing-masing peserta didik yang dapat diimplementasikan di masyarakat. Pada tahun 2020 Kurikulum Merdeka hadir dengan inovasi meningkatkan iptek dalam pelaksanaan kurikulum. Transformasi kurikulum yang terjadi di Indonesia dengan ciri khas masing-masing tentu dipengaruhi beragam faktor seperti penentuan model kurikulum yang digunakan. Hal ini tentu memiliki dampak pada pengembangan kompetensi dan *output* peserta didik/siswa.

Saran

Transformasi kurikulum meliputi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal bidang pendidikan. Transformasi kurikulum juga tidak dapat terjadi karena satu pihak, melainkan karena kebutuhan dan kewenangan dari berbagai pihak, termasuk *stakeholder*. Transformasi kurikulum di Indonesia pada dasarnya terjadi dengan berlandaskan pembaharuan dan sifat kurikulum sendiri yang dinamis guna tetap menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan dunia. Namun, jenis transformasi kurikulum yang berubah baik secara menyeluruh maupun sebagian dilakukan tanpa ada rencana durasi atau waktu pelaksanaan perubahan kurikulum tersebut. Hal ini menjadikan terdapat beragam tantangan bagi para tenaga pendidik untuk terus dapat menyesuaikan diri dengan transformasi kurikulum. Oleh karena itu, transformasi kurikulum ini akan berpengaruh terhadap ketercapaian tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya melalui proses pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar dan kompetensi ketercapaian belajar mengajar peserta didik.

Perubahan kurikulum yang dilakukan lebih mempertimbangkan faktor-faktor secara holistik. Diperlukan sosialisasi serta pelatihan untuk tenaga pendidik dan seluruh unsur pendidikan dalam satuan pendidikan secara berkelanjutan guna melihat ketercapaian antara tujuan kurikulum, bahan ajar, proses pembelajaran, serta penggunaan model kurikulum yang berkesinambungan dengan *output* pendidikan, yakni salah satunya adalah kompetensi peserta didik.

PUSTAKA ACUAN

- Achrueh, A. (2019). Komponen dan Model Pengembangan Kurikulum. *Inspiratif Pendidikan*. 8(1), hlm. 1–9. doi:10.24252/ip.v8i1.9933.
- Aisy, S.R., dan Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan sampai Orde Lama. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2).
- Alhamuddin, A. (2014). Sejarah Kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum). *Nur El-Islam*, 1(2), 48–58.
- Almarisi, A. (2023). Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah dalam Perspektif Historis. *Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 111–117. <http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd>.
- Ananda, A.P., dan -, H. (2021). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa. *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 3(2), 103–108.
- Andhara, O., Mustiningsih, M., dan Karimah, K.Z. (2020). Implementasi Model dan Desain Kurikulum di Indonesia. Dalam *Seminar Nasional Arah Manajemen Sekolah pada Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19*.
- Andini, G.T. (2018). Manajemen Pengembangan Kurikulum. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 3(2), 159–169.
- Anwar, S., dan Marlina, M. (2019). Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Zaman Orde Baru dan Reformasi). *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 87–91.
- Anwas, O.M.A.O.M. (2013). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Teknodik*, 493–504.
- Arifin, M. (2019). Model Implementasi Pengelolaan Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Fiqih (Studi Kasus di MI NU Tamrinut Tullhab Undaan Lor, Kudus) (Disertasi doktor, IAIN Kudus).
- Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15–34.

- Dewi, L., dan Astuti, N.P.E. (2022). Hambatan Kurikulum Merdeka di Kelas IV SDN 3 Apuan. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(2), 31–39. <https://jurnal.markandeyabali.ac.id/index.php/rarepustaka/article/view/128>.
- Imron, M. (2018). Pengembangan Kurikulum 1994. *Intajuna: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, Produk Bidang Pendidikan Bahasa Arab*, 2(1), 18–24.
- Insani, F.D. (2019). Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>.
- Kalantari, S., Eslam N., Bahroez M. (2020). Emergence Phenomena in Self-Organizing Systems: A Systematic Literature Review of Concepts, Researches, and Future Prospects. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*. 30(3). 224–265.
- Koesoema, D.A. (2020). Inovasi Kurikulum “Merdeka Belajar” di Era Society 5.0. *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora)*, 5(2), 72.
- Lazwardi, D. (2017). Manajemen Kurikulum sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(1), 119–125.
- Lingard, B. (2021). National Curriculum Making as More or Less Expressions of and Responses to Globalization. Dalam M.Priestley, D. Alvunger, S. Philippou, dan T. Soini (Eds.). *Curriculum Making in Europe: Policy and Practice within and across Diverse Contexts*. *Emerald*, 29–51.
- Masykur, R. (2019). Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum.
- Ministry of Education and Culture. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Ministry of Education and Culture.
- Ministry of Education and Culture. (2017). Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mulyasa, E. (2014). *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Remaja Rosdakarya.
- Puad, L.M.A.Z., dan Ashton, K. (2022). A Critical Analysis of Indonesia’s 2013 National Curriculum: Tensions between Global and Local Concerns. *The Curriculum Journal BERA*, 521–535.
- Putri, F.A., Bramasta, D., dan Hawanti, S. (2020). Studi Literatur tentang Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran The Power Of Twodi SD. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 6(2), 605–610.
- Rachma, A.S., Erihadiana, M., dan Siregar, H.S. (2024). Analisis Model Kurikulum di SDIU (Sekolah Dasar Islam Unggulan) Al-Khoir Surakarta. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 1997–2001.
- Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKN Progresif*, 15(1).
- Ramadiana, D.N., Asbari, M., dan Laksana, R.P. (2023). Asesmen Nasional: Tolok Ukur Kualitas Pendidikan Indonesia? *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(2), 17–22. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i2.896>.
- Respatiadi, F., Zid, M., dan Hotimah, O. (2022). Komparasi Kurikulum 1964 dan 1968 serta Kajian Materi Geografi pada Jenjang SMP. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Teknologi*, 9(1), 278–290.
- Ritonga, M. (2018). Politik dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia hingga Masa Reformasi. *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2).
- Sherly, D.A., dan Sihombing, A.B. (2020). Merdeka Belajar: Kajian Literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*, 1, 183–190.
- Sulaeman, A. (2015). Pengembangan Kurikulum 2013 dalam Paradigma Pembelajaran Peradaban. *Islamadina*, 15(1), 71–95.
- Tjuparmah, Y., Komarudin, S., Kurniawan, D. (2016). *Kurikulum & Pembelajaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, F. (2015). Kurikulum dari Masa ke Masa (Telaah atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia). *Al-Adabiya*, 10(2),

231–242.

Wibawanti, A. (2018). Implementasi Kurikulum Humanis dalam Proses Pembelajaran di SD Kanisius Mangunan. *Basic Education*, 7(36), 3–528.

Wirianto, D. (2014). Perspektif Historis Transformasi Kurikulum di Indonesia. *Islamic Studies Journal*, 2(1).

Zakso, A. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. (J-PSH) *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(2).
